

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH***  
**TERHADAP MEKANISME *FIT AND PROPER TEST* OLEH DPR RI**  
**DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK**  
(Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan  
MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang  
Tata Tertib DPR RI)

**SKRIPSI**

Oleh:  
**AZMIL MUKARROM**  
**NIM: C02304011**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA**  
**2009**  
**TINJAUAN *FIQH SIYASAH***

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME  
*FIT AND PROPER TEST* OLEH DPR RI  
DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK  
(Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan  
MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang  
Tata Tertib DPR RI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh:  
Azmil Mukarrom  
NIM: C02304011**

<b>PERPUSUSTAKAAN</b> INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLASIFIKASI :	S-2009/sj/041
K S-2009 041 sj	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Siyazah Jinayah**

**SURABAYA  
2009**



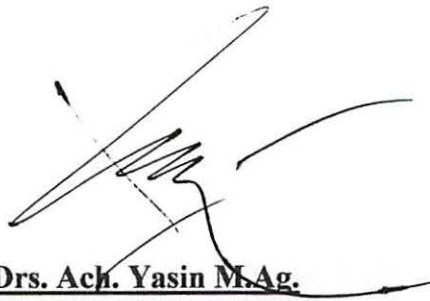
**Gadja**  
- di Semarang  
- di Surabaya

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azmil Mukarrom (NIM C02304011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2009

Pembimbing




**Drs. Ach. Yasin M. Ag.**  
NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Azmil Mukarrom, NIM C02304011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,

  
Drs. Ach. Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

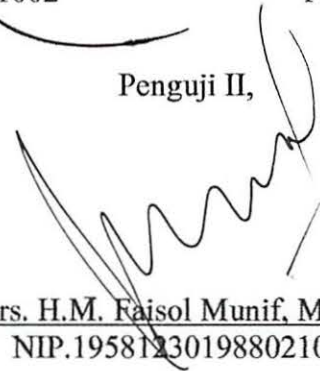
Sekretaris,

  
Muwahid, SH.,MH.  
NIP.197803102005011004

Penguji I,

  
Drs. Sam'un, M.Ag  
NIP.195908081990011001

Penguji II,

  
Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum  
NIP.195812301988021001

Pembimbing,


  
Drs. Ach. Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 03 September 2009

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
DR. H. Faishol Haq, M.Ag.  
NIP. 19500520198231002

























atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang mekanisme *Fit and Proper Test* oleh anggota DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik dalam tinjauan *Fiqih Siyasah*. Namun, sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara Nuril Huda Fakultas Hukum Universitas Air Langga tahun 2006 yang berjudul, “*Fit and Proper Test* bagi Direksi Bank Dharmawangsa,” dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang nilai-nilai penting dari kegunaan dilaksanakan *Fit and Proper test* untuk meningkatkan mutu pelayanan nasabah, secara garis besar pembahasan skripsi tersebut lebih menggambarkan kondisi Bank sebelum dan sesudah dilaksanakannya *Fit and Proper Test* direksi, dan dari penelusuran pustaka tersebut penulis tidak mendapatkan adanya mekanisme pelaksanaan *fit and proper test* yang dilakukan oleh *management* Bank Dharmawangsa. Kemudian untuk memantapkan kajian pustaka penulis juga mencari skripsi yang berhubungan dengan *Fit and Proper Test* dalam dunia Islam, seperti halnya skripsi karya saudara Muhammad Tohari Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2005 dengan judul, “Pengangkatan Menteri Sebagai Pejabat Negara Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam tinjauan *Fiqih Siyasah*,” Secara garis besar skripsi ini membahas politik praktis yang di terapkan setelah kemenangan pasangan SBY-JK, dalam pembahasan skripsi ini lebih membahas tentang etika penentuan menteri negara dalam bingkai *Fiqih siyasah*.











Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut di antaranya meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
4. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
5. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
7. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
8. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.









## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bab I : Berisi deskripsi tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang dibingkai dalam pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori tentang *Ahl al-Hālli wa al-'Aqdi*. Dalam bab ini membahas *Ahl al-Hālli wa al-'Aqdi* sebagai lembaga dalam pemerintahan Islam, yang mana menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, sejarah, kedudukan dalam pemerintahan, tugas dan wewenang, pemilihan dan membaiait/mengangkat pemimpin Negara.
- Bab III : Data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang adanya *Fit and Proper Test*, tinjauan historis proses





*Ahl al-Hālli wal al-'Aqdi* adalah istilah baru dan tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis, istilah ini baru muncul setelah masa pasca Rasulullah SAW, para *al-Sahaba* (ulama') yang telah meletakkan istilah tersebut. Ini bukan berarti istilah tersebut *bid'ah* karena belum pernah digunakan pada zaman Rasulullah saw, maupun pada zaman Sahabat. Akan tetapi, istilah-istilah keilmuan semacam ini bisa di golongkan didalam *Mashāliḥul Mursalah* (kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh Syariat Islam, sebagaimana istilah-istilah *uṣūl fiqh*, ilmu Nahwu, *Mustḥalahul Hadis* dan lain-lainnya.

Abu A'la al – Maududi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.<sup>3</sup> Al-Mawardi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-Ikhtiyar*,<sup>4</sup> karena merekalah yang berhak memilih khalifah.<sup>5</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-Syawkah*. Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menyebut *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *ahl al-syura'* hal itu terkandung dalam Tafsir-nya menyebutkan faidah-faidah musyawarah di antaranya:

1. Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah.

---

<sup>3</sup> Abu A'la Al – Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h. 245

<sup>4</sup> Imam Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sultaniyyah* h.7

<sup>5</sup> Khalifah disini kami gunakan sebagai metode *qias* dalam pengangkatan pejabat publik, karena pada dasarnya kami menganggap tentang fungsi pengangkatan yang dilakukan oleh *Ahl al-Hālli Wa al-'Aqdi* merupakan korelasi yang tepat dalam pembahasan *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pejabat publik yang ada di Indonesia..



negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang *imamah* yang dianggap legal. Dalam hal ini, Al Mawardi menjelaskan, jabatan *imamah* (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. *Pertama*, dia dipilih oleh parlemen (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model *Al Ikhtiar*. *Kedua*, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern. Sementara, tipe kedua, Al Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar as-Shiddiq.

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat *khalifah*. *pertama* dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW. Pemilihan *khalifah* tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar dan Muhajiriin, Mereka ini yang kemudian oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian

























































































































bersangkutan, keseluruhannya menanggung dosa (dipandang bersalah dalam hukum agama), tetapi yang berkaitan dengan keharusan pemenuhan tugas kolektif tersebut, cukup seorang atau sekelompok tertentu yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya tugas tersebut maka masyarakat yang bersangkutan berarti sudah menunaikan tugas kolektif itu.

Imam dimiyathi menguraikan bahwa pengangkatan hakim harus merupakan *tauliyah* dari imam atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Jika tidak terdapat penguasa seperti itu, maka *tauliyah* dilakukan oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* yang dapat menentukan pelaksanaan atau pembatalan suatu urusan penting dalam masyarakatnya, dalam hal ini seperti para ulama dan pemuka-pemuka masyarakat yang dapat berhimpun dan membuat kesepakatan diantara mereka. Atau cukup sebagian dari mereka walaupun hanya seorang diantara mereka asal ada persetujuan. Dalam proses perubahan sosial, fiqh mengembangkan teori yang lebih realistik dengan teori kekuasaan yaitu, pemegang kekuasaan dan kewenangan memerintah dengan kekuasaan yang nyata (*dzu syaukah*). Penguasa seperti itu dapat menggantikan kedudukan imam dalam fungsinya menegakkan (melindungi dan mengurus). Kepentingan umum dari masyarakatnya, sebagai satu hal yang tak terelakkan (*li dharurah*) untuk tidak terbengkalai kepentingan rakyat























